

**PEMBERDAYAAN PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA SEBAGAI EVALUASI
PENDIDIKAN KARAKTER DIMASA PANDEMI
(PKM Pada Perguruan Tinggi Kota Surakarta Jawa Tengah)**

Wartoyo, Anita Trisiana

Universitas Slamet Riyadi, Surakarta

*Email: anita.trisiana@unisri.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pendidikan karakter saat ini di masa Pandemi dirasakan sangat terasa berbeda sekali. Perubahan yang sangat frontal terjadi dalam pembelajaran, dan ada perubahan tatanan nilai yang menjadi bagian dari penerapan pendidikan karakter. Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di Indonesia menjadi motivasi pokok mainstreaming implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Pentingnya pengembangan pendidikan karakter ini gayung bersambut dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Untuk itu Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat strategis untuk mengupayakan evaluasi pendidikan karakter dimasa pandemi, sebagai salah satu wujud dukungan dari pemberdayaan kampus merdeka belajar. Khalayak sasaran dalam program kemitraan masyarakat ini adalah Masyarakat Non Produktif, yaitu Perguruan Tinggi di Kota Surakarta. Khalayak sasaran tersebut dijadikan sebagai Kampus Merdeka Belajar yang memerlukan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan berupa kegiatan evaluasi pendidikan karakter sebagai salah satu kegiatan yang akan menopang dan menyaring permasalahan konflik sosio- kultur yang muncul dalam masyarakat sehingga ketentraman dan kenyamanan akan tercapai dalam kehidupan masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian menunjukan bahwa perguruan tinggi menindaklanjuti kebijakan MBKM, yang kemudian melakukan beberapa program kegiatan yang mendukung evaluasi pendidikan karakter melalui integrasi dari berbagai kebijakan yang dimiliki, sebagaimana adanya kebijakn 4A (Anti: Korupsi, Intoleransi, Kekerasan Seksual, Perudungan). Seperti di Universitas Slamet Riyadi Kebijakan 4A tersebut dikembangkan menjadi 6A, dengan tambahan Anit: Narkoba, dan Radikalisme, Terorisme. Untuk itu masing-masing PT mampu meningkatkan dan memberikan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat khususnya pengembangan IPTEK di Perguruan Tinggi.

Kata kunci: *Pemberdayaan; Merdeka Belajar; Pendidikan Karakter*

PENDAHULUAN

Merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar diluar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Tuntutan kebijakan Merdeka belajar tersebut, mendapat tantangan tersendiri pada masa pandemic sekarang ini. Pandemi Covid-19 meniscayakan proses kegiatan belajar-mengajar (KBM) dilaksanakan secara daring (online). Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan Perguruan Tinggi. Segala aktivitas pembelajaran dilakukan dari rumah tanpa proses tatap muka antara guru dan siswa. Secara akademis kegiatan pembelajaran masih dapat dilakukan melalui media digital, tapi pendidikan karakter peserta didik sedikit terabaikan.

Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan penting dari Pendidikan Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tidak dapat dimungkiri, keberlangsungan pendidikan karakter peserta didik belum terlaksana sesuai harapan. Berdasarkan analisis sederhana penulis, tantangan pelaksanaan pendidikan karakter pada masa wabah covid-19 ini dapat dideteksi dari dua hal. Pertama, pembelajaran berbasis online membuat siswa kehilangan role model dan sosok yang menjadi panutan. Kedua, penggunaan teknologi digital tidak mampu menjamin peserta didik aman dari terpaan konten-konten negatif yang berakibat pada persoalan moralitas dan krisis karakter.

Salah satu kunci pendidikan karakter adalah adanya role model individu berkarakter. Di Kampus, yang menjadi role model bagi mahasiswa dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter adalah sosok seorang dosen. Dosen yang berkarakter akan mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai ajaran agama dalam kesehariannya sehingga dapat ditiru oleh mahasiswa. Evaluasi terhadap Pendidikan karakter mutlak dilakukan karena memiliki tantangan tersendiri. Tantangannya terletak pada pengembangan sistem manajemen pembelajaran dimana semua mata kuliah secara efektif terfasilitasi, sebagai bagian dari perencanaan implementasi pendidikan karakter di Perguruan Tinggi (Trisiana, 2019). Pendidikan karakter dalam masyarakat, akan menghasilkan warga masyarakat yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya. Diklat Bina Karakter Bagi Kampus di Surakarta sebagai salah satu kegiatan yang terarah dan terukur untuk memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun keterampilan kewarganegaraan serta mewujudkan karakter nasional, dan kegiatan diklat tersebut telah sesuai dengan Rencana Induk Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Universitas Slamet Riyadi.

Perwujudan kualitas pemberdayaan dan layanan masyarakat menjadi bagian dari rekayasa sosial dan model pemberdayaan pendidikan serta pelatihan yang dapat dijadikan sebagai embrio di propinsi atau daerah lain sebagai elemen yang memiliki peran yang sangat vital untuk Kegiatan kemitraan ini bermaksud, menelaah lebih lanjut bagaimana pengembangan model pemberdayaan kampus merdeka dalam rangka mendukung Revolusi Mental.

METODE

CIPP adalah sebuah pendekatan sistem sosial untuk evaluasi. Sebuah sistem sosial adalah seperangkat kegiatan yang saling terkait dan berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks tertentu. Untuk itu kegiatan pengabdian ini menggunakan metode CIPP dari singkatan evaluasi dari keseluruhan berdasarkan *Context* (Konteks), *Inputs* (Input), *Process* (proses), dan *product* (produk). Evaluasi Konteks menilai kebutuhan, problem, asset, peluang, untuk membantu pembuat keputusan mendefinisikan tujuan dan prioritas dan membantu pengguna untuk menilai tujuan, prioritas, dan outcome.

Evaluasi Input menggunakan pendekatan-pendekatan alternatif, penetapan rencana tindakan, perencanaan staffing, dan keuangan untuk feasibility /kelayakan dan keefektifan pembiayaan yang potensial untuk mencapai target dan tujuan yang diperlukan. Para pengambil keputusan menggunakan evaluasi input ini dalam pemilihan perencanaan, penulisan proposal pendanaan, pengalokasian sumber-sumber daya, penugasan staff, penjadwalan kerja, dan utamanya membantu orang lain melakukan upaya perencanaan dan penyusunan anggaran. Evaluasi proses menilai implementasi perencanaan untuk membantu staff melakukan kegiatan, dan kemudian membantu kelompok pengguna yang lebih luas menilai implementasi program dan menginterpretasikan outcome nya. Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai outcome- yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, jangka pendek dan jangka panjang- untuk membantu staff tetap fokus dalam mencapai outcome yang penting dan utamanya membantu kelompok pengguna yang lebih luas agar sukses meraih target yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan bangsa dan negara, membutuhkan kontribusi penyelesaian masalah oleh semua komponen. Selain itu kegiatan pengabdian ini memberikan rekomendasi di tingkat nasional untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat secara efektif dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka. Solusi permasalahan di atas, memiliki relevansi dengan tujuan

pemberdayaan Masyarakat, menurut Mardikanto (2014), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Perbaikan Kelembagaan “Better Institution”
Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemintraan usaha.
- b. Perbaikan Usaha “Better Business”
Perbaikan pendidikan “semangat belajar”, perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan Pendapatan “Better Income”
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- d. Perbaikan Lingkungan “Better Environment”
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan Kehidupan “Better Living”
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan Masyarakat “Better Community”
Berikut ini terdapat beberapa model pemberdayaan masyarakat, terdiri atas:
 - a. Community leader: petugas melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Misalnya Camat, lurah, kepala adat, ustad, dan sebagainya.
 - b. Community organization: organisasi seperti PKK, karang taruna, majlis taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
 - c. Community Fund: Dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat.
 - d. Community material : setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan.
 - e. Community knowledge: pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan yang menggunakan pendekatan community based health education.
 - f. Community technology: teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program. (Suyanto: 2010).

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut “Soekanto, (1987).

- a. Tahap Persiapan
Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan Pengkajian “Assessment”
Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “feel needs” dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan
Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “exchange agent” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi
Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan

mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan “Implementasi” Program Atau Kegiatan

Berikut ini Dokumentasi kegiatan Pelatihan *Public Speaking* sebagai bentuk layanan *community knowledge* bagi mahasiswa untuk pembentukan karakter menghadapi dunia kerja, dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa melalui pendekatan *community based health education*. Sehingga calon wisudawan yang akan masuk dunia kerja memiliki karakter yang cerdas dan Tangguh.



Gambar 1. Drs. Wartoyo, M.Pd sebagai Narasumber Pendidikan Karakter pada kegiatan Diklat dan Pelatihan *Public Speaking* bagi Mahasiswa dan Calon Wisudawan



Gambar 2. Peserta kegiatan Diklat dan Pelatihan *Public Speaking* bagi Mahasiswa dan Calon Wisudawan

Upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

g. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat

membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

h. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Berikut ini, adalah hasil riset tim pengabdian, untuk menjadi bahan rujukan kegiatan pemberdayaan kemitraan, sebagai berikut:

1. Project Citizen: Innovation and Challenges Of Education Learning Models To Improve Millennial Generation Characters (Wartoyo & Anita Trisiana, 2020)
2. Model of Community Empowerment In Universities In Order To Support Pancasila-Based on Mental Revolution, (Anita Trisiana & Wartoyo, 2020)

KESIMPULAN

Pemberdayaan di Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan MBKM dapat dilakukan melalui program kebijakan secara berkelanjutan di masing-masing Perguruan Tinggi, hal ini merupakan bagian evaluasi pendidikan karakter. Proses tersebut merupakan keseluruhan proses yang melibatkan seluruh civitas kampus dapat ikut serta mengamati, menganalisis, dan mengetahui masalah apa saja yang timbul di kampusnya masing-masing. Selain itu, melalui kegiatan pemberdayaan, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh di pendidikan formal untuk mewujudkan hal positif di masyarakat. Gerakan pemberdayaan PT, melalui integrasi dari berbagai kebijakan yang dimiliki, sebagaimana adanya kebijakan 4A (Anti: Korupsi, Intoleransi, Kekerasan Seksual, Perudungan). Seperti di Universitas Slamet Riyadi Kebijakan 4A tersebut dikembangkan menjadi 6A, dengan tambahan Anti: Narkoba, dan Radikalisme, Terorisme.

Kebijakan 6A, dimulai dari masa penerimaan mahasiswa baru, sampai dengan pelaksanaan pembekalan dan pelatihan bagi calon wisudawan yang akan diwisuda setiap periodenya. Kegiatan tersebut, dilakukan Bersama dengan Koordinator MKU Universitas, dan Unit Pengembangan Karier.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. (2020). *Panduan Merdeka Belajar—Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Donie Koesuma, 2007. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik di Zaman Global*. Grasindo: Jakarta
- Knirk, Frederick G., & Gustafson, Kent L. 1986. *Instructional technology: A systematic approach to education*. New York : Holt, Rinehart, and Winston
- Kesuma, dkk. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktek di Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Simon & Schuster, Inc.
- Musfiroh. 2008. *Pendidikan Karakter Anak Sejak Dari Rumah*. PT. Pustaka Insan Madani: Yogyakarta
- Nurla Isna Aunillah. 2011. *Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Laksana
- Yahya Khan. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*. Yogyakarta: Pelangi Publishing
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winataputra, Udin S. 2003. *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*. Jakarta: Universitas Terbuka